

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Israel adalah sebuah negara kecil di pinggiran Timur Laut Tengah. Di seputar negara yang mengaku sebagai tempat tinggal orang-orang Yahudi ini, ada sejumlah Negara Arab. Di sebelah utara ada Libanon, di timur ada Yordania dan Suriah, di barat daya ada Mesir. Melihat letak geografisnya Israel berbeda dengan negara-negara lain di wilayah Timur Tengah.<sup>1</sup> Ditinjau dari sejarah berdirinya Israel yang merupakan satu-satunya negara Yahudi (*The Jewish State*) di dunia, didasarkan atas beberapa sumber seperti; klaim teologis yang berasal dari warisan Perjanjian Lama Kitab Injil, deklarasi Balfour yang diumumkan Inggris Raya pada 1917 serta pemisahan wilayah Palestina oleh PBB pada tahun 1947 yang merupakan sumber terbentuknya Negara Israel.

Dalam proses perpolitikan di Israel khususnya politik luar negeri Israel, dijalankan berdasarkan kepentingan dalam negerinya. Maka, segala kebijakan luar negerinya sedapat mungkin memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan dalam negeri. Hal ini mengingat sejarah berdirinya negara itu, Israel merasa keamanan dalam negerinya juga merupakan salah satu fungsi diplomatik internasionalnya. Israel dari segi konstitusionalnya menganut sistem demokrasi. Sebagaimana yang dipahami dalam konsep demokrasi adalah sebuah konsep yang

---

<sup>1</sup> Riza Sihbudi. 1995. *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Jakarta : PT.Dunia Pustaka Jaya.

menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme dan menjunjung tinggi kebebasan sebuah negara tanpa adanya intervensi.

Dalam proses kepentingan luar negeri Israel terhadap negara-negara baik itu dunia Arab maupun negara-negara selain Arab tidak terlepas dari tujuan utama politik luar negeri Israel. Ada 3 tujuan utama politik luar negeri Israel :<sup>2</sup>

1. Tujuan pertama dan perhatian utama dari tujuan kebijakan luar negeri Israel berada dalam kebijakan luar negeri dan keamanan yaitu untuk meningkatkan keamanan negara. Kebijakan ini mempunyai bermacam-macam komponen dalam meraihnya.
2. Tujuan yang kedua adalah membentuk, melestarikan dan mengembangkan hubungan yang damai dengan negara-negara Arab, Timur Tengah dan Afrika dan tidak hanya negara tetangga yang berdampingan tetapi juga di dunia Arab secara menyeluruh. Tentunya ini akan memperkuat keamanan Israel dan juga akan membebaskan Israel dari isolasi geografis regional dan juga mampu memfasilitasi perdagangan dan pertukaran lain dengan tetangganya.
3. Tujuan yang ketiga adalah melindungi Yahudi yang menjadi minoritas di mana pun juga, dan melestarikan hubungan antara mereka dan Israel sebagai satu-satunya Negara Yahudi.

Israel berupaya melawan anti semit dimana pun juga, dan menjamin imigrasi ke Israel baik dari tempat yang berbahaya maupun tempat yang aman.

Tentunya ini akan membantu komunitas Yahudi untuk berkontribusi terhadap

---

<sup>2</sup> Bernard Reich. 2001. *Israel Foreign Policy*, in L. Carl Brown, ed., *Diplomacy In The Middle East: The International Relation of Regional and Outside Powers*, I.B. Tauris: London and New York.

kebaikan Israel. Dalam hal kebijakan luar negeri, para pemimpin Israel menempatkan sebuah keamanan sebagai hal yang tidak dapat ditawar-tawar. Israel akan melindungi dirinya terhadap negara-negara yang dianggap membencinya baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Sehingga menjadikan Israel sebagai negara yang disegani oleh negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah.<sup>3</sup>

Israel adalah negara Yahudi yang dikelilingi oleh negara yang mayoritas Muslim. Israel sering melakukan konflik terhadap negara-negara tetangga. Dalam sejarah menunjukkan bahwa telah terjadi lima kali ketegangan ataupun perang antara Israel dengan negara-negara Arab. Pertama, terjadi pada tahun (1948-1949) yakni sebuah perang yang bermula dari keputusan PBB untuk melakukan partisi Palestina menjadi Negara Arab dan Yahudi sehingga membangkitkan kemarahan dari beberapa Negara Arab tersebut yang berujung dalam bentuk perang besar.<sup>4</sup> Perang kedua meletus pada 29 Oktober sampai 7 November 1956 menyangkut sengketa Terusan Suez.

Perang ketiga pada tahun 1967 dapat dikatakan cukup tenang, kecuali konflik-konflik perbatasan yang tidak pernah menjadi konflik penting yang melibatkan Negara-negara Arab yang berbatasan dengan Israel. Perang Keempat meletus pada tahun 1973 yakni perang antara Mesir dan Suriah melawan Israel. Dan yang terakhir yaitu perang kelima terjadi pada tahun (1982) yaitu masalah Palestina sebagai kesatuan terdepan yang memperjuangkan pulihnya hak-hak

---

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup> Riza Sihbudi.1993. *Konflik dan diplomasi di Timur Tengah*. Eresco

rakyat Palestina yang paling asasi yang diakui baik dunia Arab maupun dunia Internasional.<sup>5</sup>

Pada permulaan dekade 1960-an, Afrika tampil sebagai saingan baru Arab. Israel memanfaatkan hubungan baiknya dengan negara-negara yang baru merdeka di Afrika sambil mencoba mengadakan pendekatan kembali dengan negara-negara berkembang di Asia. Hingga tahun 1961 Israel telah mengadakan perjanjian perdagangan, bantuan dan kebudayaan dengan lebih dari 35 negara di Asia dan Afrika.<sup>6</sup>

Sudan merupakan salah satu negara yang terletak di timur laut Afrika yang sekaligus merupakan negara terluas di Afrika dan di daerah Arab serta negara terluas kesepuluh di dunia menjadi salah satu incaran Israel. Negara Sudan merupakan negara yang berbatasan dengan Mesir di sebelah Utara, Laut Merah di sebelah Timur Laut, Negara Kongo dan Negara Afrika Tengah di sebelah Barat Daya. Negara Chad di sebelah Barat dan Libya di sebelah Barat Laut. Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia, memisahkan negara ini menjadi bagian selatan dan utara.<sup>7</sup>

Sudan yang pada saat itu dilanda konflik internal akibat dari pemisahan antara Sudan bagian Selatan dengan Sudan bagian Utara serta adanya perbedaan etnis, ideologi yang berlanjut pada sebuah kesenjangan pembangunan yang cenderung diskriminatif antara wilayah pusat yang terletak di Utara dan Sudan bagian selatan menjadi pemicu panasnya konflik penduduk Sudan Selatan yang

---

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>George Lenczowski. 1993. *Timur Tengah Di Tengah Kancah Dunia*. Terj. Asgar Bixby. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

<sup>7</sup>*Sudan* (diakses pada 17 Februari 2011); diunduh dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Sudan>

didominasi oleh orang-orang Negro. Karakteristik geografis dan iklim yang kontras antara Sudan Selatan dan dunia Arab itu, ditambah lagi dengan perbedaan agama, etnis, bahasa, budaya, dan latar belakang sejarah, membuat dua wilayah di Sudan ini tak pernah merasa dekat.<sup>8</sup> Dengan perbedaan tersebut, Sudan Selatan yang menganggap dirinya sebagai wilayah yang penuh dengan penindasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh Sudan Pusat pada akhirnya melakukan sebuah pemberontakan terhadap Sudan Pusat yang berujung pada kesiapan diri untuk menyatakan referendum di tahun 2011.

Dalam referendum yang digelar pada tanggal 9 Januari 2011 ini, telah tercatat bahwa hampir 4 juta warga Sudan bagian selatan tepatnya sekitar 3.930.916 pemilih atau separuh dari penduduk Sudan Selatan yang telah mengambil bagian pesta politik yang amat menentukan masa depan Sudan Selatan. Pendaftaran pemilih Sudan dimulai sejak 15 November 2010. Selain itu, pendaftaran juga dilakukan di wilayah Utara Sudan, pemerintah mendaftarkan pula warganya yang ada di negara tetangga, seperti Uganda, Kenya, Etiopia, dan Mesir, serta di Australia, Inggris, Amerika Serikat dan Kanada. Pemilihan dilakukan secara serempak.<sup>9</sup>

Banyak orang yang mengharapkan wilayah Selatan, yang didominasi Kristen akan memilih merdeka dari Utara yang mayoritas Muslim. Konflik sektarian telah mendorong keduanya terlibat perang saudara berdarah lebih dari dua dekade. Menurut Chan Reek Madut, anggota komisi referendum, mayoritas

---

<sup>8</sup>*Ketiadaan kepemimpinan yang kuat di Negara-negara Arab Meluluskan Niat Asing* (diakses pada 10 Februari 2011); diunduh dari <http://www.rimanews.com/read/20110110/12224/ke-tiadaan-kepemimpinan-yang-kuat-di-negara-negara-arab-memuluskan-niat-asing>

<sup>9</sup>*Kolom internasional*(diakses pada 5 Januari 2011); diunduh dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com).

pemilih (52) persen adalah kaum perempuan. Komisi telah melakukan berbagai upaya yang disetujui bersama untuk menjamin wanita yang umumnya tidak berpendidikan di daerah-daerah pedesaan dapat mencatatkan diri untuk ikut serta dalam memilih.<sup>10</sup>

Sudan Selatan kemungkinan besar akan menjadi negara terbaru di dunia pada Juli mendatang, meskipun kemungkinan sebaliknya tidak tertutup sama sekali. Menggagas Sudan pascareferendum akan lebih bermakna dalam konstelasi yang lebih besar, yakni kesatuan Arab-Afrika. Secara geografis, Sudan Selatan memang lebih dekat dengan Afrika ketimbang dengan dunia Arab. Jadi jalan pemisahan Sudan Selatan kali ini sangat tepat untuk disemangati sebagai kelahiran kembali keutuhan Arab-Afrika yang berdampingan. Persiapan pemisahan itu juga tidak berlangsung instan, karena sesuai dengan kesepakatan damai Nifasha di Kenya pada 2005 yakni, memberikan hak untuk menentukan sendiri bagi rakyat Sudan selatan, enam tahun sejak penandatanganan kesepakatan itu.<sup>11</sup>

Pemisahan Sudan Selatan mendapat dukungan dari negara-negara di dunia baik itu negara-negara Arab sebagian maupun negara-negara Afrika dan barat terutama Amerika Serikat. Ada pun dua negara Arab terkemuka di Afrika yang paling berkepentingan terhadap keutuhan wilayah Sudan yakni Mesir dan Libya akhirnya tidak bisa berbuat banyak. Dalam lawatan terakhir pertengahan Desember lalu ke Khartoum, Presiden Mesir Hosni Mubarak bersama Pemimpin

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Menggagas Sudan Pascareferendum* (diakses pada 12 Januari 2011); diunduh dari <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/01/12/134395/10/Menggagas-Sudan-Pascareferendum>

Libya, Moammar Kaddafi di hadapan Presiden Sudan, Omar Hassan Al-Bashir dan pemimpin Sudan Selatan, Silva Keir menegaskan bahwa mereka menerima apapun hasil referendum mendatang. Karenanya hampir semua analis Arab menyebutkan bahwa disintegritas Sudan adalah suatu kepastian setelah referendum 9 Januari mendatang.<sup>12</sup>

Apalagi kalangan pemuka Kristen di Selatan menjadi ujung tombak mendukung pemisahan, sementara dari kalangan ulama Islam di Selatan yang diharapkan sebagai ujung tombak mendukung integrasi tidak terdengar nyaring suara mereka.<sup>13</sup> Adapun dukungan Amerika atas milisi separatis Selatan Sudan ternyata sudah dilakukan sejak lama. Washington Times menyebutkan bahwa di akhir tahun 2009, Amerika telah menggelontorkan bantuan pertahun sebesar satu miliar dolar kepada kawasan selatan Sudan untuk menciptakan struktur, infrastruktur dan pelatihan militer.<sup>14</sup> Hal ini juga terlihat dari 25 kali kunjungan utusan khusus AS, Scott Gration, ke Sudan dalam dua tahun terakhir dan rapat intensif di Washington.<sup>15</sup>

Tentunya dukungan negara-negara Afrika dan Amerika Serikat serta beberapa negara-negara seperti Mesir dan Libya tidak sebesar pengaruh yang di berikan oleh Israel terhadap Sudan Selatan dalam rangka untuk memisahkan diri dari Sudan. Hal ini bisa dilihat dari pemisahan Sudan Selatan berawal dari tahun

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>*Sudan antara Separasi dan Syariat Islam* (diakses pada 22 Februari 2011) di unduh dari <http://www.hidayatullah.com/read/14614/29/12/2010/sudan-antara-separasi-dan-syariat-islam.html>

<sup>14</sup>*Amerika dan Israel Otak Dibalik Pecahnya Republik Sudan* (diakses pada 24 Februari 2011); diunduh dari <http://irengputih.com/amerika-dan-israel-otak-di-balik-pecahnya-republik-sudan/1681/>

<sup>15</sup>*Manca Negara Demi Ketentraman Sudan* (diakses pada 16 Maret 2011); diunduh dari <http://beritaindonesia.co.id/mancanegara/demi-ketentraman-sudan>

1950an, di mana Sudan bagian Selatan membentuk sebuah pemberontakan untuk menentang pemerintahan Khartoum oleh umat Islam Arab yang ada di Utara.

Para pemberontak mengatas namakan dirinya sebagai pengikut Kristiani sebagai “Anya-Nya”.<sup>16</sup> Pemberontakan yang dilakukan oleh Sudan Selatan tidak hanya dilakukan oleh keinginan semata tetapi tentunya mendapat dukungan dari luar yang ingin membuat Sudan terpisah. Pada tahun 1989, pemberontakan Sudan di bagian Selatan menjadi lebih agresif bertepatan dengan semakin gencarnya dari Sudan Utara untuk menanamkan rezim Islam di negara tersebut. Hal ini disebabkan adanya pihak luar yang memberikan semangat yang berapi-api terhadap pemberontakan tersebut. Israel misalkan.

Israel dengan tegas menyatakan dirinya sebagai ketua yang menyokong kebangkitan “Anya-Nya”. Israel mulai melancarkan provokasi kepada penduduk untuk melakukan pemberontakan. Tidak hanya itu, mereka juga mempersenjatai penduduk Sudan Selatan dengan berbagai persenjataan militer dan mendirikan akademi militer untuk para pemuda Sudan di Ethiopia, Uganda, dan Kenya. Bahkan tentara dan perwira Israel mendirikan karantina khusus untuk melatih pemuda-pemuda Sudan, dengan mengambil tempat di dalam negeri Sudan.

Di dalam buku *The Israel Connection* tulisan Benjamin Beit-Hallahmi menyatakan bahwa Israel telah menyokong pemberontakan Sudan dibagian Selatan semenjak tahun 1960-an. Dan semenjak itu, Israel memberikan kepada pergerakan pemberontakan “Anya-Nya” berbagai senjata api maupun latihan militer. Berdasarkan maklumat Rolf-Steiner, seorang askar, yang bertarung

---

<sup>16</sup> Harun Yahya. 2003. *Zaman Kegelapan Islam dan Ketibaan Era Kebangkitan Islam*. Malaysia: Perniagaan Jahabersa



dengan Anya-Nya, Israel menjadi pelindung utama pihak pemberontak di bagian selatan.<sup>17</sup>

Hubungan baik antara kelompok pemberontak di Sudan Selatan yang ingin memisahkan diri dari Sudan dengan Israel, telah terbina lama sebelum John Garang, pimpinan kaum pemberontak muncul ke pentas politik Sudan. Upaya penguasaan Sudan telah dirintis Zionis Israel sejak tahun 50-an. Mereka membina hubungan dengan penduduk Sudan Selatan dengan cara memberikan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar kepada penduduk di Sudan Selatan dan sebagian di Sudan Utara. Dengan dukungan yang dilakukan oleh Israel terhadap Sudan bagian Selatan, maka membuat Sudan bagian Selatan semakin optimis untuk mendapatkan negara yang terlepas dari Sudan. Dengan sekongan bantuan Israel terhadap Negara Sudan Selatan untuk memisahkan diri dari Negara Sudan, maka Israel telah melanggar nilai-nilai demokrasi sesuai dengan konstitusinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari gambaran yang dapat kita tangkap pada bagian latar belakang permasalahan terkait dengan dukungan Israel terhadap pemisahan Sudan Selatan dari negara Sudan, maka permasalahan yang ada tersebut dapat kita rumuskan sebagai berikut; Mengapa Israel memberikan dukungan kepada Sudan Selatan untuk memisahkan diri dari Negara Sudan?

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

### C. Landasan Teori

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan konsep Kepentingan Nasional. Dalam konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano adalah tujuan fundamental dan determinan yang paling menentukan yang memandu para pengambil keputusan suatu negara dalam membuat kebijakan-kebijakan politik luar negeri sehingga kepentingan nasional suatu negara biasanya konsep yang digeneralisasi dari elemen-elemen yang membentuk kebutuhan-kebutuhan vital suatu negara. Kepentingan nasional erat kaitannya dengan politik luar negeri suatu negara. Suatu negara sering menekankan konsep kepentingan nasional pada politik luar negerinya dalam menentukan kebijakan suatu negara.

Politik luar negeri adalah *“a strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieving specific goal defined in terms of national interest”*.<sup>18</sup>

Untuk melakukan analisis terhadap sebuah kebijakan luar negeri, umumnya digunakan *decision-making theory* (teori pembuatan keputusan), khususnya *foreign policy decision-making*. Teori pembuatan keputusan mengidentifikasi sejumlah besar variabel yang relevan dan mengemukakan saling keterkaitan yang mungkin ada dari berbagai variabel tersebut.

Kepentingan nasional memiliki tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri dan ditunjuk untuk ;<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Jack C. Plano and Roy Olton. 1978. *The International Relations Dictionary*. Printed in The United States of America

<sup>19</sup>*Ibid.*

1. *Self-Preservation*
2. *Security*
3. *National Well-being*
4. *Protection and advancement of technology*
5. *The pursuit of Power*

Oleh karena itu, karena suatu negara biasanya tidak hanya memiliki satu kepentingan dalam sebuah negara yang mendominasi fungsi pembuatan kebijakan luar negeri suatu pemerintahan. Namun, mereka yang dipilih sebagai calon objek kekuasaan orang lain adalah mereka yang bersungguh-sungguh untuk memperoleh kekuasaan atas orang lain. Jadi pelaku di kancah politik pada saat yang sama sekaligus sebagai calon majikan dan calon subyek. Selagi ia berusaha memperoleh kekuasaan atas orang lain, orang lain berusaha memperoleh kekuasaan atas dirinya.

Menurut Holsti, pilihan atas salah satu dari ketiga orientasi paling tidak dipengaruhi empat kondisi atau variabel. Pertama adalah struktur sistem internasional, yaitu "*pattern of dominance, subordination, and leadership of an international system*" yang berkonsekuensi munculnya pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan bertindak negara-negara yang menjadi anggota unit. Kedua, strategi umum politik luar negeri sebuah negara bisa dikaitkan dengan "*the nature of its domestic attitudes and social economic needs*". Ketiga, "*the degree to which policy makers perceive a persisting external threat to their own values and interests*". Dan terakhir, lokasi geografi, karakteristik topografis, dan sumber daya alam yang dipunyai suatu negara.

Pembahasan terhadap empat variabel ini tentunya akan memberi kerangka teoretik yang makin jelas. Untuk menjelaskan dan memahami *output* (kebijakan luar negeri), perlu dikaji mengenai persepsi, kesan, sikap, nilai dan keyakinan dari pembuat keputusan yang bertanggung jawab untuk menformulasikan sasaran dan tindakan (kondisi aktor pengambil kebijakan). Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi penetapan sasaran, keputusan dan tindakan, diklasifikasikan sebagai “penetapan situasi” (*definition of situation*). “Penetapan situasi” mencakup kondisi eksternal dan domestik, kondisi historis, dan kontemporer yang dianggap relevan oleh para pembuat keputusan terhadap masalah politik luar negeri.

Politik luar negeri suatu negara dirumuskan untuk kepentingan politik dalam negeri. Israel merupakan negara yang sangat memadukan antara kebijakan politik dalam negeri dengan politik luar negerinya, dengan menempatkan faktor keamanan dalam negeri sebagai kepentingan utamanya. *Output* kebijakan politik luar negeri suatu negara dihasilkan melalui suatu proses pengambilan keputusan politik luar negeri (*foreign policy decision making proces*).

Andersen membagi kebijakan luar negeri Israel menjadi tiga fase. Pada fase pertama Israel masih disibukkan dengan awal berdirinya negara. Israel membutuhkan pengakuan Internasional. Diplomasi yang dijalankan disesuaikan dengan kebutuhan itu. Pada fase kedua politik luar negeri Israel lebih menitik beratkan kepentingan domestik. Pembangunan dalam negeri tergantung pada

keamanan daerah perbatasan. Untuk melaksanakan hajatnya itu, Israel membekali para diplomat asingnya agar dapat mendekati negara Arab tetangganya.<sup>20</sup>

Israel menggunakan politik *carrot-and stick* dalam berhubungan dengan negara tetangganya. Politik *carrot* dijalankan bagi negara yang mau negosiasi dan kerja sama dengan Israel. Dengan politik *stick*, Israel ingin menunjukkan bahwa dia superior dalam bidang militer. Untuk menunjukkan kekuatannya ini, Israel bergantung pada kemurahan negara Barat terutama Amerika Serikat (AS). Pada fase ketiga, hubungan Israel dengan AS agak “merenggang”. AS menyadari kebutuhannya pada minyak Timur Tengah. Embargo minyak Timur Tengah pada awal 1970-an cukup membuat repot AS. Kondisi ini membuat AS berpikir untuk mengubah politiknya di Timur Tengah. AS akhirnya memperhatikan kepentingan negara Arab yang dianggapnya “moderat”. Perubahan ini tentunya mengurangi perhatian AS kepada Israel yang sebelumnya menjadi “anak emas”. Melihat keadaan ini, Israel menerapkan politik luar negerinya secara lebih pragmatis. Dari lima unsur politik luar negeri yang ada di atas, unsur yang dipakai dalam penulisan ini hanya tiga yaitu, *Self Preservation, Security, The Pursuit of Power*.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan Uraian singkat diatas, hipotesis penulis adalah kepentingan Politik Israel terhadap dukungan pemisahan Sudan Selatan dari negara Sudan dapat dilihat dari bentuk ;

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

1. *Self-Preservation* adalah kelangsungan hidup suatu negara yang memiliki konsep kepentingan nasional yang bertujuan untuk mempertahankan diri agar negara-negara yang memiliki *power* yang besar tidak melakukan atau merebut hegemoni kekuasaan. Untuk mencapai *self-preservation* ini, Israel melakukan hubungan-hubungan bilateral dengan negara-negara tetangganya untuk memperkuat hegemoninya.
2. *Security* adalah sebuah konsep yang sangat mendasar yang sangat dijunjung tinggi oleh Israel dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Dalam sistem kepentingan nasionalnya yang bertujuan untuk menjaga negara dari kekuasaan militer negara lainnya.
3. *The Pursuit Of Power* adalah keinginan Israel untuk mengejar kekuasaan yang mampu menjadikan Israel sebagai negara yang adidaya di dunia Arab.

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Dalam meneliti hubungan dukungan Israel terhadap Sudan Selatan, penulis mengkaji mulai dari proses ;

1. Israel mendukung saporatisme Sudan Selatan untuk memisahkan diri dari Sudan pada tahun 1960-an berupa pemberian bantuan terhadap para pemberontak “Anya-Nya”. Israel dengan tegas menyatakan dirinya sebagai ketua

yang menyokong kebangkitan “Any-Nya”.Israel mulai melancarkan provokasi kepada penduduk untuk melakukan pemberontakan.

2. Melalui bantuan Israel, Sudan Selatan akhirnya melakukan referendum pada tahun 2011 dan akan di sahkan pada bulan Juli. Penulis juga lebih banyak mengkaji tentang pengaruh Israel terhadap Sudan Selatan. Selain itu, penulis akan fokus melihat bagaimana sejauh ini pengaruh Israel di dalam mendukung Sudan Selatan terpisah dari negara Sudan, penulis juga akan melihat profil negara Israel, mulai dari terbentuknya hingga menjadi negara yang mampu memberikan pengaruh di Timur Tengah serta melihat profil negara Sudan yang selama ini dilanda konflik internal.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akar permasalahan pemisahan Sudan Selatan dari wilayah Sudan yang merupakan salah satu konflik yang mewarnai di dalam diri Sudan itu sendiri. Selain itu, keinginan untuk mengetahui kebijakan Israel terkait dengan konsep kepentingan nasional Israel terhadap Sudan Selatan sehingga berujung pada keinginan Sudan Selatan melakukan referendum dan kajian ini bersifat meningkatkan wawasan keilmuan, serta menjadikan penelitian ini sebagai praktek dalam membuat karya ilmiah.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yakni dengan cara pengumpulan data dari berbagai macam sumber yang ada untuk

mendukung penelitian tersebut. Adapun yang penulis lakukan adalah sebagai berikut;

1. Mengumpulkan referensi-referensi yang terkait dengan penelitian penulis, baik itu dari perpustakaan, maupun Dosen dan teman sendiri.
2. Mengkliping koran Kompas yang memuat perkembangan berita tentang Sudan Selatan.
3. Membuka website dan mencari data tambahan melalui internet.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut ;

### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang; Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Landasan Teoritik, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Tujuan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II. Gambaran Umum Negara Israel**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum negara Israel yang meliputi, Sejarah berdirinya Israel, Dasar-dasar Politik Luar Negeri Israel, Dinamika Politik Luar Negeri Israel.



### **BAB III. Dukungan Israel Terhadap Pemisahan Sudan Selatan**

Pada bab ini menjelaskan tentang Profil Negara Sudan Selatan, Gerakan Sapatisme dan Referendum Sudan Selatan, Respon Negara Arab terhadap Pemisahan Sudan Selatan, Dukungan Israel terhadap Gerakan Sapatisme Sudan Selatan.

### **BAB IV. Analisis Kebijakan Politik Luar Negeri Israel Terhadap Sudan Selatan**

Bab ini akan menjelaskan tentang Analisis kebijakan politik luar negeri Israel yang meliputi; *Self-Preservation, Security, The Pursuit of Power*.

### **BAB V. Kesimpulan**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian Kepentingan Israel Mendukung Gerakan Sapatisme Sudan Selatan Pada Tahun 1960-2011.

### **Daftar Pustaka Dan Lampiran**

Berisi data buku, literatur, dan artikel yang digunakan selama penulisan dan dicantumkan dalam tulisan ini.